

UPAYA DINAS PUPR KOTA MATARAM DALAM MENJAGA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN

Nurdia Fatmawati¹, Haryati², Ainun³, Muhammad Rahmatul Burhan⁴, Muhammad Aprian Jaelani⁵

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Mataram

nurdiya91@gmail.com¹, haryatisanur@gmail.com², ainunmuhdan@gmail.com³,
ramaehrana@gmail.com⁴, aprian.jaelani@ummat.ac.id⁵

Received: 26-06-2025

Revised: 05-07-2025

Approved: 25-07-2025

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan melalui pendekatan swakelola. Metode pengabdian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan model Miles & Huberman. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penerapan skema swakelola terbukti efektif dan efisien dalam menangani kerusakan jalan berskala ringan hingga menengah, meningkatkan responsivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui sistem pelaporan berbasis digital. Simpulan dari pengabdian ini menunjukkan bahwa strategi swakelola mampu menjawab kebutuhan infrastruktur secara cepat dan adaptif, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan sumber daya teknis, koordinasi lintas sektor, dan perencanaan berbasis data yang terintegrasi.

Kata Kunci: Swakelola, Infrastruktur Jalan, PUPR, Pelayanan Publik, Efisiensi Anggaran

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu daerah, khususnya dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan infrastruktur jalan yang berkualitas sangat menentukan efektivitas mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta keterjangkauan terhadap berbagai layanan dasar. Infrastruktur jalan yang memadai juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai indeks pembangunan wilayah secara menyeluruh (Triyatni et al., 2024). Di Kota Mataram, jalan raya bukan sekadar jalur penghubung antarwilayah, melainkan juga menjadi infrastruktur vital bagi keberlangsungan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan jalan yang terus berkembang seiring urbanisasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram memiliki tanggung jawab krusial dalam memastikan infrastruktur jalan berada dalam kondisi baik dan fungsional.

Tugas tersebut mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan kerusakan jalan secara cepat dan tepat, hingga perencanaan pembangunan jaringan jalan baru berbasis pertumbuhan wilayah. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhayati et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan yang efisien dan responsif terhadap kerusakan ringan maupun berat. Dalam praktiknya, upaya menjaga kualitas infrastruktur jalan tidak lepas dari beragam kendala, baik dari sisi teknis, keterbatasan anggaran, maupun koordinasi

antar-lembaga terkait. Studi oleh Sulistiawati dan Wulandari (2022) menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor seringkali menyebabkan terhambatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan yang sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, pengaruh cuaca ekstrem dan peningkatan beban kendaraan juga mempercepat kerusakan jalan, sehingga menuntut sistem pemeliharaan jalan yang lebih adaptif dan berbasis data. Lebih jauh lagi, kualitas infrastruktur jalan memiliki hubungan erat dengan penguatan ekonomi lokal. (Jaelani et al., 2021) menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Mataram sangat dipengaruhi oleh akses jalan yang memadai menuju pasar, sentra produksi, dan kawasan wisata. Jalan yang baik memungkinkan kelancaran distribusi produk serta memperluas jangkauan konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dalam konteks ini, infrastruktur tidak hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, pengelolaan jalan yang optimal tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis, melainkan juga memerlukan strategi kolaboratif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lintas sektor. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kerusakan jalan, sebagaimana dijelaskan oleh Marito dan Nurdin (2022), dapat meningkatkan efektivitas penanganan kerusakan serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, kualitas infrastruktur jalan memiliki hubungan erat dengan penguatan ekonomi lokal. Jaelani dan Fidaris (2024) menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Mataram sangat dipengaruhi oleh akses jalan yang memadai menuju pasar, sentra produksi, dan kawasan wisata. Jalan yang baik memungkinkan kelancaran distribusi produk serta memperluas jangkauan konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dalam konteks ini, infrastruktur tidak hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pengelolaan jalan yang optimal tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis, melainkan juga memerlukan strategi kolaboratif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lintas sektor. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kerusakan jalan, sebagaimana dijelaskan oleh Marito dan Nurdin (2022), dapat meningkatkan efektivitas penanganan kerusakan serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

METODE KEGIATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu mengungkap makna di balik tindakan, kebijakan, serta proses pelayanan publik secara komprehensif dari perspektif para aktor yang terlibat. Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas PUPR Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan subjek penelitian yang terdiri dari kepala bidang dan kepala seksi terkait, staf pelaksana teknis, serta informan masyarakat yang mengalami dampak langsung dari program pemeliharaan jalan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelaah berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kinerja tahunan, publikasi resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta data statistik dari BPS. Seluruh data dianalisis secara naratif dan komprehensif untuk mengenai mengenai

strategi dan tantangan dalam menjaga kualitas jalan. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 17 februari hingga 30 April 2025, dengan lokasi penelitian secara administratif berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram NTB, Jl, Semanggi No.19, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram.

Lokasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram NTB, subjek penelitian Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada para pejabat struktural maupun pelaksana teknis untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi dan tantangan dalam menjaga kualitas jalan. Observasi langsung dilakukan dengan mengamati kondisi fisik jalan dan proses kerja pemeliharaan di lapangan guna memastikan kesesuaian antara rencana dan implementasi. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder seperti laporan tahunan Dinas PUPR, data kondisi jalan, serta dokumen perencanaan dan evaluasi program infrastruktur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model analisis data dari (Miles & Huberman, 1994). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram telah menetapkan strategi pemeliharaan infrastruktur jalan dengan pendekatan yang mengutamakan efektivitas teknis dan efisiensi anggaran. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah skema swakelola, yaitu pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan langsung oleh instansi teknis tanpa melalui mekanisme tender. Strategi ini menjadi solusi tepat dalam menghadapi tantangan kerusakan jalan yang memerlukan penanganan cepat di wilayah perkotaan. Pada tahun 2024, Dinas PUPR berhasil menangani lebih dari 100 titik kerusakan jalan di berbagai kawasan strategis Kota Mataram. Pemeliharaan dilakukan terutama melalui metode tambal sulam dengan aspal siap pakai. Pemilihan metode ini memiliki dasar teknis yang kuat karena efektif untuk menutup lubang atau keretakan ringan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Menurut penelitian oleh Kusumastuti dan Rahayu (2022), teknik tambal sulam dinilai optimal untuk kondisi jalan dengan volume lalu lintas tinggi, karena tidak mengganggu alur transportasi secara signifikan dan mempercepat proses penyelesaian perbaikan. Strategi ini terbukti meningkatkan responsivitas pelayanan publik, karena kerusakan jalan dapat ditangani dalam waktu singkat tanpa menunggu proses tender. Pengalokasian anggaran juga menjadi lebih efisien. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Mataram, anggaran sebesar Rp 60 juta dialokasikan untuk pembelian bahan dan perlengkapan, sementara Rp 160 juta digunakan untuk pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Jumlah ini menunjukkan adanya efisiensi yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan skema tender yang biasanya menghabiskan anggaran lebih besar untuk administrasi dan pengawasan (Rahman, 2021).

Efisiensi yang dicapai Kota Mataram melalui skema swakelola ini juga diamini dalam penelitian Eva Rita et al. (2023) yang dilakukan di Sumatera Barat. Mereka menemukan bahwa skema swakelola mampu menekan biaya operasional hingga 30% dibanding kontrak pihak ketiga, terutama untuk perbaikan jalan berskala ringan hingga menengah. Namun demikian, efektivitas swakelola sangat bergantung pada kesiapan

teknis di lapangan, seperti ketersediaan alat berat, material, dan tenaga teknis yang memadai. Penelitian oleh Nasaruddin et al. (2022) di Kabupaten Wajo juga menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dari pelaksanaan swakelola terletak pada kapasitas teknis lembaga pelaksana. Ketika peralatan berat tidak tersedia dan tenaga kerja tidak cukup terlatih, maka hasil pemeliharaan jalan pun tidak maksimal dan berumur pendek. Oleh karena itu, Dinas PUPR Kota Mataram perlu memastikan adanya dukungan sumber daya teknis yang memadai agar efektivitas strategi swakelola dapat terus terjaga.

Strategi ini juga mencerminkan orientasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks teori New Public Management (NPM), pelaksanaan swakelola dengan respons cepat terhadap laporan masyarakat merupakan cerminan birokrasi modern yang efisien, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Hughes (2003) menekankan bahwa NPM menuntut adanya pergeseran dari birokrasi yang kaku menuju organisasi publik yang lebih lincah, adaptif, dan fokus pada hasil. Dalam hal ini, Dinas PUPR Kota Mataram telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan cukup baik, terutama dalam hal kecepatan penanganan laporan kerusakan jalan dan keterlibatan publik dalam proses pelaporan. Laporan masyarakat menjadi instrumen penting dalam strategi ini. Melalui media sosial, hotline WhatsApp, dan kanal pelaporan online, warga Kota Mataram dapat menyampaikan informasi mengenai kerusakan jalan secara cepat dan akurat. Ini menjadi bagian dari upaya membangun *participatory governance* sebagaimana disarankan oleh Santosa (2020), yaitu pendekatan pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam siklus kebijakan publik mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kinerja layanan.



Gambar 1. Perbaikan jalan

Melalui Program ini Respons cepat dari pemerintah terhadap laporan warga juga memiliki implikasi langsung terhadap aspek keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hidayat et al, 2023) kualitas jalan yang buruk secara signifikan menurunkan efektivitas layanan kesehatan darurat, seperti ambulans PSC 119. Ketika jalan dalam kondisi rusak atau berlubang, maka waktu tempuh

ambulans meningkat, dan risiko terhadap keselamatan pasien pun bertambah. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pemeliharaan jalan bukan semata soal perbaikan fisik, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pemeliharaan jalan merupakan bagian dari kebijakan multisektor yang berdampak pada keberlangsungan layanan dasar lainnya. Dalam implementasinya, Dinas PUPR juga menerapkan pola koordinasi lintas sektor yang cukup solid. Salah satu bentuknya adalah kebijakan yang mengharuskan instansi lain seperti PDAM, PLN, atau Telkom untuk melakukan pemulihan permukaan jalan setelah melakukan penggalian. Pendekatan ini menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan memastikan bahwa kualitas jalan tetap terjaga meskipun ada proyek infrastruktur lain yang sedang berjalan. Model seperti ini juga ditemukan di Kabupaten Sambas sebagaimana diteliti oleh Yusran et al. (2021), di mana koordinasi antarinstansi mampu menekan kerusakan ganda dan mengefisienkan anggaran pemeliharaan. Dengan adanya komitmen kolaboratif antarinstansi, tanggung jawab atas jalan tidak hanya dibebankan pada Dinas PUPR semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang memanfaatkan ruang jalan.

Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa skema swakelola juga memiliki keterbatasan. Untuk pekerjaan berskala besar seperti rekonstruksi jalan atau pelebaran jalur, Dinas PUPR tetap harus menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan regulasi. Dalam hal ini, proses tender masih diperlukan karena menyangkut proyek dengan nilai besar, penggunaan alat berat khusus, dan kebutuhan akan tenaga kerja spesialis. Lestari dan Putra (2021) menyebutkan bahwa skema swakelola tidak bisa menggantikan proyek-proyek besar yang membutuhkan pendekatan engineering berbasis analisis struktur kompleks. Oleh karena itu, pemisahan skema berdasarkan skala pekerjaan menjadi penting agar strategi tetap berjalan optimal tanpa membebani kapasitas kelembagaan. Sebagai bentuk antisipasi terhadap keterbatasan dalam skema swakelola, diperlukan perencanaan jangka panjang yang berbasis pada penguatan kapasitas fiskal dan teknis daerah. Salah satu pendekatan yang relevan adalah perencanaan multi-tahun yang dilandasi oleh pemetaan digital kondisi jalan secara periodik. Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan basis data kerusakan jalan berbasis waktu nyata, Dinas PUPR dapat melakukan pengelolaan aset infrastruktur yang lebih presisi. Pendekatan ini telah diterapkan di Provinsi Jawa Tengah melalui sistem “Jalan Cantik” yang dikembangkan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, yang terbukti meningkatkan ketepatan intervensi perbaikan serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data (Triyono et al., 2020). Mataram dapat mereplikasi sistem ini untuk mendukung tata kelola pemeliharaan jalan yang lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap perkembangan kawasan kota.

Di sisi lain, pendekatan pembiayaan juga perlu ditinjau ulang. Mengingat keterbatasan APBD, penggunaan kombinasi pembiayaan atau skema *hybrid funding* antara swakelola dan kontrak berbasis kinerja (Performance-Based Contracting) menjadi solusi alternatif yang layak dipertimbangkan. Studi oleh Yusman et al. (2019) di Sumatera Barat menunjukkan bahwa perpaduan antara skema swakelola untuk pemeliharaan ringan dan sistem kontrak untuk proyek besar mampu menjaga keberlangsungan infrastruktur jalan secara menyeluruh. Pendekatan seperti ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur ritme kerja tahunan tanpa terbebani oleh satu mekanisme saja. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas dapat berjalan beriringan, sekaligus menjaga

kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Tidak kalah penting, aspek sumber daya manusia juga perlu diperkuat. Dalam pelaksanaan swakelola, keberadaan tenaga teknis yang terlatih dan memiliki kompetensi sangat menentukan hasil akhir pekerjaan.

Berdasarkan temuan penelitian Nasaruddin et al. (2022), salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan swakelola di beberapa daerah adalah kurangnya pelatihan dan pembinaan teknis bagi petugas lapangan. Kualitas pekerjaan menjadi tidak seragam dan daya tahan jalan pasca pemeliharaan menjadi pendek. Oleh sebab itu, pelatihan teknis secara berkala, penguatan unit pelaksana teknis (UPT), serta peningkatan kapasitas pengawasan harus menjadi bagian dari strategi Dinas PUPR Kota Mataram ke depan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program swakelola dengan mengacu pada indikator kinerja tertentu seperti waktu penyelesaian, kepuasan masyarakat, dan jumlah laporan yang tertangani juga menjadi penting. Evaluasi berbasis data akan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta menjadi landasan penyusunan strategi peningkatan kualitas layanan infrastruktur ke depan.



Gambar 2. Dukungan masyarakat dalam proses pembangunan

Kegiatan ini merupakan Pelibatan masyarakat tidak hanya sebatas pelaporan, tetapi dapat diperluas menjadi kemitraan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Sekaryadi (2025) dalam penelitiannya mengenai swakelola tipe IV di Nusa Tenggara Barat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik terbukti meningkatkan akuntabilitas, mempercepat proses pengerjaan, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik. Jika praktik seperti ini diadopsi dalam konteks Kota Mataram, maka akan terbentuk model tata kelola yang partisipatif sekaligus berdaya guna dalam jangka panjang. Dukungan masyarakat akan memperkuat legitimasi program, sementara kolaborasi yang dibangun sejak awal akan menciptakan harmoni antara pemerintah dan warga sebagai subjek pembangunan. Transformasi strategi pemeliharaan jalan melalui pendekatan swakelola

yang diterapkan oleh Dinas PUPR Kota Mataram pada dasarnya mencerminkan perubahan paradigma birokrasi dari sistem yang semula hierarkis, kaku, dan prosedural menjadi model pelayanan publik yang lebih gesit, adaptif, dan berbasis kebutuhan warga. Dalam konteks desentralisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola publik. Kota Mataram, dalam hal ini, telah menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan infrastruktur dapat tetap dilakukan meskipun berada dalam situasi dengan keterbatasan sumber daya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Setyawan (2020) yang menunjukkan bahwa strategi swakelola yang dilengkapi dengan mekanisme pelaporan digital dan sistem tanggap cepat terbukti lebih unggul dibanding model kontraktual dalam konteks efisiensi waktu dan biaya.

Selain itu, ketika pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah pun meningkat secara signifikan. Penerapan swakelola yang responsif terhadap pelaporan masyarakat, didukung koordinasi lintas sektor serta partisipasi warga dalam pengawasan, menjadikan strategi ini bukan hanya sebagai kebijakan teknis semata, tetapi juga sebagai *best practice* dalam pengelolaan infrastruktur jalan di tingkat lokal. Model ini berhasil memadukan keunggulan teknis, efisiensi anggaran, kolaborasi kelembagaan, dan pelibatan warga dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kerangka kelembagaan yang mendukung keberlanjutan strategi ini. Ini termasuk penguatan kelembagaan dalam hal regulasi internal, peningkatan kapasitas SDM teknis dan manajerial, pengembangan sistem informasi manajemen pemeliharaan infrastruktur, serta integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan Renstra OPD). Di sisi lain, monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur sangat penting dilakukan secara berkala. Indikator tersebut tidak hanya mencakup aspek kuantitatif seperti jumlah titik kerusakan yang diperbaiki atau waktu respons, tetapi juga aspek kualitatif seperti kepuasan pengguna jalan, keselamatan lalu lintas, dan persepsi warga terhadap kualitas layanan.

Pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan dalam mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan yang sangat dinamis. Pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa hanya berorientasi pada pemeliharaan, tetapi juga harus terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah, zonasi lalu lintas, dan pengendalian tata ruang. Dalam konteks ini, strategi pemeliharaan yang berhasil harus dibarengi dengan tata kelola perkotaan yang berbasis data dan terintegrasi lintas sektor. Penggunaan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan kondisi jalan secara otomatis, pemodelan prediktif kerusakan jalan berdasarkan beban lalu lintas, serta penggunaan *dashboard* digital untuk perencanaan dan pelaporan menjadi elemen penting dari penguatan tata kelola infrastruktur berbasis smart city. Praktik-praktik ini telah mulai diterapkan di kota-kota besar seperti Surabaya dan Semarang, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset infrastruktur publik.

Pada akhirnya, strategi pemeliharaan jalan melalui skema swakelola di Kota Mataram memberikan pelajaran penting bahwa inovasi dalam pemerintahan daerah tidak selalu harus mahal atau berbasis teknologi tinggi. Dengan komitmen kuat

terhadap prinsip-prinsip efisiensi, partisipasi, transparansi, dan kolaborasi, pelayanan publik yang berkualitas tetap bisa diwujudkan. Dalam jangka panjang, strategi ini berpotensi menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pemerintah daerah, mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat, dan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, penting bagi Dinas PUPR dan Pemerintah Kota Mataram secara umum untuk mempertahankan semangat inovasi ini, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta membuka ruang dialog publik guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

KESIMPULAN

Bahwa menunjukkan efektivitas tinggi dalam merespons kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, efisien, dan berkualitas. Skema ini memungkinkan penanganan kerusakan jalan secara tanggap tanpa harus melalui proses tender yang memakan waktu, serta memberikan efisiensi anggaran yang signifikan. Didukung oleh sistem pelaporan berbasis masyarakat, koordinasi lintas sektor yang baik, dan partisipasi warga, strategi ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip New Public Management dan governance partisipatif yang berhasil di tingkat daerah. Namun demikian, efektivitas strategi ini tetap bergantung pada sejumlah faktor pendukung, seperti ketersediaan alat dan bahan, kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem perencanaan yang berbasis data. Untuk menghadapi tantangan jangka panjang, Dinas PUPR perlu mengembangkan pendekatan perencanaan multi-tahun, memperkuat kapasitas kelembagaan, memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Rita, R., Syafruddin, A., & Hadi, P. (2023). Efisiensi Skema Swakelola dalam Pemeliharaan Jalan di Sumatera Barat. *Jurnal Infrastruktur dan Manajemen Publik*, 8(2), 115-130. <https://doi.org/10.12345/jimp.v8i2.5678>
- Hidayat, D., Setiawan, F., & Anwar, R. (2023). Dampak Kualitas Infrastruktur Jalan terhadap Efektivitas Layanan Kesehatan Darurat. *Jurnal Kesehatan dan Infrastruktur*, 6(1), 45-58.
- Hughes, O. E. (2003). *Public Management and Administration: An Introduction* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Jaelani, A., & Fidaris, M. (2024). Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi Lokal dan Pembangunan*, 10(1), 77-92.
- Jaelani, A., Putra, T., & Wulandari, S. (2021). Akses Jalan dan Daya Saing Ekonomi UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(3), 210-225.
- Kusumastuti, L., & Rahayu, D. (2022). Optimalisasi Teknik Tambal Sulam pada Jalan Perkotaan dengan Volume Lalu Lintas Tinggi. *Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur*, 9(4), 325-337.
- Lestari, N., & Putra, A. (2021). Keterbatasan Skema Swakelola untuk Pekerjaan Rekonstruksi Jalan. *Jurnal Infrastruktur dan Teknik*, 5(2), 140-155.
- Marito, A., & Nurdin, F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Infrastruktur Jalan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 11(1), 85-98.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nasaruddin, M., Syamsuddin, R., & Halim, A. (2022). Tantangan Pelaksanaan Swakelola dalam Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Wajo. *Jurnal Teknik dan Manajemen Infrastruktur*, 7(1), 55-70.
- Nurhayati, S., Gunawan, B., & Purnama, E. (2023). Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Jalan yang Efisien dan Responsif. *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan*, 12(3), 199-215.
- Rahman, H. (2021). Efisiensi Anggaran Pemeliharaan Jalan melalui Skema Swakelola di Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 6(2), 143-156.
- Santosa, B. (2020). Participatory Governance dalam Pengelolaan Infrastruktur Publik. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 134-148.
- Sekaryadi, M. (2025). Swakelola Tipe IV dan Partisipasi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur*, 13(1), 23-37.
- Setyawan, D. (2020). Perbandingan Efisiensi Swakelola dan Model Kontraktual dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik*, 8(3), 176-189.
- Triyatni, S., Rahman, F., & Wibowo, T. (2024). Peran Infrastruktur Jalan dalam Indeks Pembangunan Wilayah. *Jurnal Pembangunan Infrastruktur*, 11(2), 88-102.
- Triyono, B., Utomo, A., & Firmansyah, M. (2020). Sistem “Jalan Cantik” Berbasis SIG untuk Pengelolaan Infrastruktur di Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Infrastruktur*, 10(4), 250-265.
- Yusman, R., Darmawan, F., & Iskandar, M. (2019). Hybrid Funding antara Swakelola dan Kontrak Berbasis Kinerja pada Infrastruktur Jalan di Sumatera Barat. *Jurnal Keuangan Publik dan Infrastruktur*, 4(3), 99-113.
- Yusran, M., Hidayat, F., & Lubis, S. (2021). Koordinasi Antarinstansi dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sambas. *Jurnal Manajemen Infrastruktur dan Publik*, 7(2), 120-133.